

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang merancang pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita negara, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan dana atau anggaran agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dalam menjalankan pembangunan nasional pemerintah membutuhkan banyak biaya. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional ini berasal dari pendapat yang diperoleh dari hasil memanfaatkan kekayaan alam dan iuran dari masyarakat yang berupa pajak.

Saat ini pajak merupakan salah satu pendapatan utama yang diandalkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional selain hutang dan pinjaman luar negeri serta penerimaan pada sektor migas (Faried, 2013). Penerimaan pajak tidak akan optimal jika tingkat kepatuhan pajak rendah seperti kurangnya kesadaran dalam pembayaran dan pelaporan SPT. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perpajakan serta menerapkan modernisasi sistem untuk memudahkan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan.

Pajak sendiri merupakan iuran yang bersifat wajib yang dibayar rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat kontraprestasi atau timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Soemitro yang dikutip dalam Resmi (2014:1).

Dijelaskan dalam salah satu artikel online, yang menerangkan bahwa hingga tahun 2015 penerimaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) II Jawa Timur baru tercapai 62% dari target penerimaan pajak yang telah ditentukan yakni sebesar Rp 16,3 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 pencapaian penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) II Jawa Timur ialah sebesar Rp 10,10 triliun (suara mandiri.com, 2015). Sebagaimana diketahui bahwa DJP II Jawa Timur sendiri membawahi 15 KPP, yang meliputi KPP Madya Sidoarjo, KPP Pratama Ponorogo, KPP Pratama Tuban, KPP Pratama Sidoarjo Utara, KPP Pratama Sidoarjo Selatan, KPP Pratama Lamongan, KPP Pratama Sidoarjo Barat, KPP Pratama Ngawi, KPP Pratama Gresik Utara, KPP Pratama Gresik Selatan, KPP Pratama Mojokerto, KPP Pratama Bangkalan, KPP Pratama Bojonegoro, KPP Pratama Madiun, dan KPP Pratama Pamekasan.

Kepatuhan untuk melaporkan SPT Tahunan menjadi salah satu perihal yang menjadi perhatian pemerintah untuk dapat meningkatkan pajak. Hal ini dijelaskan oleh Dharmayasa & Setiawan (2016) yang mengungkapkan bahwa untuk dapat membantu kelancaran pertumbuhan ekonomi negara, peran masyarakat yang telah menjadi wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan dan membayar pajak merupakan perihal yang penting. Hal ini pula yang mendorong pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan target kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak. Hal ini dikarenakan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama

Lamongan terus mengalami peningkatan, sebagaimana yang ditunjukkan pada

Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Lamongan

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah WP Keseluruhan
2012	54.265	60.245
2013	61.650	68.368
2014	68.242	75.712
2015	78.627	87.292
2016	87.053	97.006

Sumber: Data Internal KPP Pratama Lamongan

Adanya peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2016 ternyata tidak diimbangi dengan kepatuhan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.

Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Lamongan

Tahun Pajak	SPT Tahunan OP 1770	SPT Tahunan OP 1770S	SPT Tahunan OP 1770SS	Total	Persentase
2012	1.186	2.282	33.476	36.944	68%
2013	1.123	3.948	25.788	30.859	50%
2014	2.117	6.609	19.536	28.262	41%
2015	1.487	8.143	22.184	31.814	40%
2016	1.578	9.114	17.245	27.937	32%

Sumber: Data Internal KPP Pratama Lamongan

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.2, diketahui bahwa peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun 2012 hingga 2016 berbanding terbalik dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lamongan pada tahun yang sama. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2, bahwa pada tahun 2016 jumlah wajib pajak mencapai angka 87.053 namun, pada tahun yang sama jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak hanya sebesar 32% dari jumlah wajib

pajak yakni sejumlah 27.937. Fenomena ini menjelaskan bahwa terdapat permasalahan yang serius pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Lamongan.

Telah diketahui bahwa sejak tahun 1984, Indonesia telah mengadopsi sistem perpajakan yang lebih modern yakni *self assessment system*. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan (Darmayasa & Setiawan, 2016). *Self assessment system* sendiri merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam melakukan modernisasi pada sistem administrasi perpajakan secara nasional yang juga termasuk di KPP Pratama Lamongan. Sejak tahun 2001, Direktorat Jendral Pajak telah melakukan beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan sebagai prioritas reformasi yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat Rahman (2010:213-214). Darmayasa & Setiawan (2016) mengungkapkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu perihal yang mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pernyataan yang dijelaskan oleh Darmayasa & Setiawan (2016) dibuktikan melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariani & Utami (2016) yang menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ananda (2015) mengungkapkan bahwa terdapat hal lain yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yakni sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian pengetahuan dan pembinaan kepada wajib pajak agar

mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan Megantari, dkk (2017). Lebih lanjut dijelaskan oleh Ananda (2015) bahwa semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, semakin sering kegiatan sosialisasi perpajakan dilaksanakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini kemudian direalisasikan oleh DJP II Jawa Timur untuk dapat mencapai target penerimaan pajak di tahun 2015. Namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa bahwa kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak masih belum optimal (suaramandiri.com, 2015).

Pelayanan sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat sehingga pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus berusaha memperbaiki kualitas pelayanan agar mendekati harapan yang diinginkan masyarakat sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Ilhamsyah, dkk (2016) yang menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya pelayanan proses perpajakan masih buruk. Lebih lanjut dijelaskan oleh Ilhamsyah, dkk (2016) bahwa untuk dapat menggeser persepsi masyarakat tersebut, peningkatan kualitas layanan yang ditawarkan oleh aparatur pemerintahan di sektor pajak juga perlu ditingkatkan.

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa perihal penting yang diduga dapat memberikan dampak pada tingkat

kepatuhan masyarakat untuk melaporkan kewajiban pajak, diantaranya modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas layanan, dan sosialisasi perpajakan. Ketiganya merupakan perihal yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama atau DJP selaku perwakilan pemerintah di sektor pajak, untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya di KPP Pratama Lamongan melalui peningkatan kepatuhan pelaporan pajak.

Selain faktor eksternal atau faktor dari luar individu wajib pajak, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Benk, *et al* (2016) menjelaskan bahwa terdapat faktor internal yakni religiusitas wajib pajak mampu memberikan dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan kewajiban pajak, walaupun dampak yang diberikan masih tergolong rendah. Nilai agama yang dianut oleh masyarakat mampu mencegah sikap negatif dan mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula dengan perilaku kepatuhan perpajakan masing-masing individu disebut dengan dimensi konsekuensi religiusitas. Dimensi konsekuensi religiusitas berkaitan dengan perilaku seseorang yang berkaitan dengan komitmen ajarannya Marliani (2013). Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Benk, *et al* (2016) mengenai pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Matatya Tunisia yang tentu memiliki demografi yang berbeda dengan Kabupaten Lamongan, Indonesia.

Persepsi korupsi merupakan sebuah argumen bagi wajib pajak terhadap pegawai pajak yang seringkali terkait kasus-kasus korupsi perpajakan. Penambahan variabel persepsi korupsi didasarkan pada artikel online yang bersumber dari (kompasiana.com,2017) menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat sebagai wajib

pajak telah memudar. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap partisipasi wajib pajak untuk memaksimalkan target pajak. Direktorat Jenderal Pajak seharusnya memperbaiki sistem manajemen kepegawaian dan memperkuat kontrol atas sistem perpajakan melalui kebijakan-kebijakan. Gaji yang tinggi tidak akan mampu membasmi bibit-bibit korupsi bila kesadaran moral belum muncul. Semakin banyak perilaku petugas pajak yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya, seperti petugas pajak yang melakukan tindak korupsi pajak, akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan, dan akan membuat masyarakat untuk enggan membayar pajak (Rahmania, dkk 2017).

Lingkungan merupakan sesuatu yang ada disekitar wajib pajak yang berpengaruh dan mampu memberikan dorongan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar atau tidak. Lingkungan terdiri keluarga, teman, dan jaringan sosial. Jika wajib pajak berada dalam lingkungan yang memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi akan berpengaruh terhadap individual tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikembangkan oleh Widyastuti (2015) dengan beberapa modifikasi. Indikator lingkungan wajib pajak yang digunakan ialah masyarakat yang dominan berperilaku patuh terhadap pajak masyarakatnya melaporkan pajak secara benar. Sehingga wajib pajak termotivasi untuk melaporkan dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

Alasan penting dilakukan penelitian ini karena terdapat *GAP Research* atau ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga peneliti termotivasi untuk mereplikasi hasil peneliti terdahulu. Oleh karena itu, judul yang

diangkat dalam penelitian ini ialah “**Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lamongan)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Religiusitas berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah Persepsi Pengetahuan Korupsi berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
6. Apakah Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang maka tujuan penelitian yang akan diangkat adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Persepsi korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat bagi STIE Perbanas Surabaya

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan melengkapi koleksi bacaan ilmiah pada perpustakaan

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan.

2. Manfaat bagi KPP Pratama Lamongan

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan untuk dapat meningkatkan pendapatan pada sektor pajak melalui variabel sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, religiusitas, persepsi korupsi, dan lingkungan wajib pajak melalui wajib pajak orang pribadi sehingga dapat membantu mempercepat pembangunan di Kabupaten Lamongan.

3. Manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Lamongan mengenai pentingnya kepatuhan pembayaran pajak dan pelaporan pajak.

4. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dalam rangka mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Kemudian akan mengambil keputusan yang tepat terkait penelitian melalui pengembangan teori-teori dari penelitian terdahulu.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yang saling terkait yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang dan permasalahan yang menjadi dasar ditulisnya penelitian ini, juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang melandasi permasalahan dalam penelitian ini, dimana landasan teori ini diperoleh dari literatur dan karya tulis penelitian sebelumnya yang terkait langsung dengan permasalahan, topik serta judul penelitian yang dibahas oleh peneliti, juga berisi model analisis dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang meliputi pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dibahas mengenai subyek penelitian serta analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan, keterbatasan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

